

HAMBATAN IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

Nurwidya Kusma Wardhani, Imam Koeswahyono, S.H, M.Hum,

Dr. Indah Dwi Qurbani, S.H, M.H

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email : widkusma@gmail.com

ABSTRACT

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca pertambangan. Pertambangan di Kabupaten Malang dibagi atas pertambangan mineral logam, mineral non logam dan mineral batuan. Tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis hambatan implementasi dan upaya mengatasi hambatan implementasi Perda Kabupaten Malang Nomor 2 tahun 2012 terkait dengan pengawasan oleh dinas terkait. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis melihat pengawasan yang dilakukan oleh dinas terkait seperti Dinas ESDM, BP2T, Bappeda, BLH, DPPKA, BPN, Bagian Hukum dan Satpol PP Linmas Kabupaten Malang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan di bidang pertambangan menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Undang-Undang Pemerintahan Daerah baru telah menimbulkan hambatan dalam implementasi Perda Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2012 termasuk dalam hal pengawasan dikarenakan tidak diatur secara spesifik dinas/badan/bagian mana yang seharusnya melakukan pengawasan di bidang pertambangan.

Keyword: pertambangan, pertambangan mineral, Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2012, pengawasan.

ABSTRACT

Mining is part or all stages in order to research, the management and cultivation of mineral or coal includes the public investigation, exploration, a feasibility study on, construction, mining, processing and purification, transporting and selling and activities after mining. Mining in Malang District based on a metallic mineral mining, non metal mineral and rock mineral. The purpose of research to know and analyze resistances implementation and efforts to overcome of Regulation of Malang District Number 2 year 2012 relating to scrutiny by the relevant office. Methods used in this research is empirical juridical with the

approach sociological juridical see supervision by the relevant office by ESDM departement, BP2T , Bappeda, BLH, DPPKA, BPN, the legal department and Satpol PP and community protection of Malang District. The results of research shows that after the act number 23 year 2014 on local government, affairs in the field of mining become central government authority and the province government. The new local government act has led resistances in implementation of regulation Malang District Number 2 year 2012 including in terms of supervision because not set specific office which the body should supervise mining in the field

Keyword: mining, mineral mining, Regulation of Malang District Number 2 year 2012, supervision

A. Pendahuluan

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan bahwa kekayaan alam termasuk pertambangan dapat dijadikan sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan bangsa Indonesia sehingga perlu adanya campur tangan Negara di dalamnya, yang berbunyi: “bumi,air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Kemakmuran rakyat tidak hanya diatur dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, namun juga diatur dalam pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang berbunyi :

“Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara tersebut pada ayat (2) pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat, dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka berdaulat, adil dan makmur”.

Salah satu kabupaten yang memiliki hasil pertambangan melimpah di Provinsi Jawa Timur yang perlunya tanggung jawab pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan-nya yaitu Kabupaten Malang sebagai kabupaten yang memiliki hasil tambang melimpah.

Wilayah Kabupaten Malang yang mayoritas merupakan lahan pertanian tidak serta merta membuat potensi-potensi alam lain menjadi potensi yang kurang diperhitungkan, salah satunya yaitu potensi pertambangan. Di bidang pertambangan, Kabupaten Malang memiliki banyak hasil pertambangan yang lebih fokus dalam lingkup pertambangan mineral bukan logam dan batuan meskipun untuk potensi mineral logam juga ditemukan namun dengan jumlah yang sangat sedikit.

Pertambangan mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Malang terdapat di delapan belas kecamatan, diantaranya Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Bantur, Pagak, Tirtoyudo, Donomulyo, Gedangan, Kalipare, Kepanjen, Gondanglegi, Singo-sari, Sumberpucung, Jabung, Karangploso, Wajak, Kasembon, Turen, Ampelgading, serta Dampit.

Tabel 1¹

DATA MINERAL DI KABUPATEN MALANG

NO.	KECAMATAN	JENIS-JENIS MINERAL		
		Mineral Logam	Mineral Non Logam	Mineral Batuan
1.	Sumbermanjing Wetan	Mangan, Emas	Phosphat, Kalsit, Feldspar, Bentonit, Phirophilit, Zeolit, Oker, Toseki	Gamping, Marmer
2.	Kalipare	Mangan, Emas	Kaolin, Pasir Kuarsa	Gamping, Marmer
3.	Gedangan	Pasir Besi, Emas	Kalsit, Phirophilit, Zeolit, Oker	Gamping, Marmer
4.	Dampit	Emas	Feldspar, Kaolin, Pasir Kuarsa, Oker,	Pasir, Gamping, Marmer
5.	Pagak	-	Kalsit, Tanah liat, Kaolin, Bentonit	-
6.	Bantur	-	Kalsit, Tanah liat, Kaolin, Bentonit,	-
7.	Donomulyo	-	Kalsit	-
8.	Kepanjen	-	Feldspar	-
9.	Gondanglegi	-	Feldspar	-
10.	Tirtoyudo	-	Tanah liat, Pasir Kuarsa, Bentonit, Zeolit, Toseki,	-
11.	Singosari	-	Tanah liat	-
12.	Sumberpucung	-	Tanah liat	-
13.	Ampelgading	-	Kaolin, Pasir Kuarsa,	Pasir
14.	Jabung	-	-	Andesit
15.	Karangploso	-	-	Andesit
16.	Wajak	-	-	Pasir
17.	Kasembon	-	-	Pasir
18.	Turen	-	-	Pasir

¹ Data Mineral Di Kabupaten Malang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang, 2010, hlm.55-56

Sumber : **Data Mineral Di Kabupaten Malang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang**, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang, 2010.

Melimpahnya potensi hasil pertambangan mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Malang menjadi pemicu Pemerintah Kabupaten Malang mengeluarkan Peraturan Daerah (atau disingkat Perda) Kabupaten Malang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Perda tersebut merupakan peraturan lanjutan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pengawasan lebih lanjut dari dinas terkait yaitu Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Lingkungan Hidup, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset, Badan Pertanahan Nasional dan Penataan Ruang, Bagian Hukum serta Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Malang sebagai dinas/badan yang melakukan pengawasan dan memberikan masukan terhadap implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2012 terkait pengawasan terhadap pertambangan perlu ditingkatkan agar Perda tersebut dapat diimplemen-tasikan sebagaimana peruntukannya.

B. Rumusan Masalah/Isu Hukum

1. Bagaimana hambatan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mine-ral dan Batu Bara terkait dengan pengawasan oleh dinas terkait?
2. Bagaimana upaya dinas terkait dalam mengatasi hambatan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengelo-laan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara?

C. Pembahasan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis dimana penelitian ini lebih memfokuskan diri pada pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Lingkungan Hidup, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset, Badan Pertanahan Nasional, Bagian Hukum dan Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Malang, dengan alasan bahwa dinas/ badan/bagian/satuan tersebut sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

melakukan pengawasan dan memberikan masukan terhadap keberlangsungan usaha pertambangan.

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yaitu dengan melakukan wawancara dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Lingkungan Hidup, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset, Badan Pertanahan Nasional, Bagian Hukum serta Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Malang. Sedangkan data sekunder yaitu data tambahan untuk melengkapi data primer yang diperoleh dari data-data kepustakaan meliputi:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
- c. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo Undang-undang No. 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
- d. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
- e. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- f. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3876);
- g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);

- j. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang tanggal 25 Januari 2008 Nomor 1/D)
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 2/D);
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2012 Nomor 1/E);
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
- o. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 1204 K/30/MEM/2014 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Jawa dan Bali
- p. Peraturan Bupati Malang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 20/D);
- q. Peraturan Bupati Malang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Badan Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 26/D);
- r. Peraturan Bupati Malang Nomor 44 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2012 Nomor 11/D);
- s. Peraturan Bupati Malang Nomor 52 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2012 Nomor 16/D);
- t. Peraturan Bupati Malang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Yang Menjadi Wewenang Bupati di Bidang Pelayanan Administrasi Perizinan Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2014 Nomor 3 Seri C)

Responden yang dipilih sebagai informasi dalam penelitian ini adalah :

1. Kepala Bidang Pertambangan dan Sumber Daya Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Dinas ESDM Kabupaten Malang
2. Kepala Sub Bagian Pelayanan Hukum Setda Kabupaten Malang dan Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan Bagian Hukum Kabupaten Malang
3. Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Wilayah dan Staf Bappeda Kabupaten Malang
4. Kasub Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran BLH Kabupaten Malang
5. Kepala Bagian Tata Usaha dan Staf Sub Bagian Evapor BP2T Kabupaten Malang
6. Kasi Penagihan, Pemeriksaan dan Rekonsiliasi Pendapatan Daerah DPPKA Kabupaten Malang
7. Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah Satpol PP Linmas Kabupaten Malang
8. Pegawai Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah (Subseksi Pejabat Analis Pendaftaran Hak Kantor Pertanahan Kabupaten Malang)
9. Masyarakat yang diwakili oleh Kepala Dusun RT.26 RW.12 Sumberbende Desa Argotirto Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang.

Hasil penelitian terkait hambatan implementasi Perda Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2012 terkait pengawasan oleh dinas terkait yaitu pengawasan termuat dalam Bab XVI tentang Pembinaan dan Pengawasan, diatur dalam bagian kedua yaitu pengawasan yang ada dalam ketentuan pasal 104-106 Perda Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Pengawasan pertambangan di Kabupaten Malang yang diatur dalam pasal 104-106 Perda Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara, dimana pasal 104 menyebutkan bahwa pelaksanaan pengawasan kegiatan usaha pertambangan dilakukan oleh Bupati kepada pemegang IUP atau IPR.

Berdasarkan keterangan pasal tersebut, bukan Bupati sebagai individu yang melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha pertambangan tersebut tetapi Bupati menunjuk dinas-dinas tertentu dalam hal ini Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral atau disingkat Dinas ESDM Kabupaten Malang sebagai dinas teknis yang melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan tugas pokok fungsi dari dinas tersebut.

Namun, tidak semua bidang diatas pengawasannya dilakukan oleh Dinas ESDM. Sebagaimana tugas pengawasan yang dilakukan oleh Dinas ESDM, dinas/badan/bagian lain

seperti Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Lingkungan Hidup, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset, Bagian Hukum serta Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Malang tidak serta merta tidak melakukan pengawasan hanya saja dinas/badan/bagian melakukan pengawasan lain sesuai dengan tugas pokok fungsi yang diatur dalam masing-masing Perbup atau Perda yang mengaturnya.

Aturan pengawasan yang kurang jelas dalam pasal 104-105 Perda Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara menimbulkan hambatan implementasi dalam pelaksanaan pengawasannya. Hambatan dalam hal pengawasan di bidang pertambangan di Kabupaten Malang terjadi dikarenakan belum adanya Peraturan Bupati yang mengatur pelaksanaan dari Perda Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2012 tersebut dikarenakan salah satu syarat untuk menetapkan Perbup yaitu dengan adanya Wilayah Pertambangan yang dibuat oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Keputusan Menteri ESDM terkait Wilayah Pertambangan Kawasan Jawa-Bali. Selain belum adanya Perbup pelaksanaan Perda Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2012, adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah baru menggantikan Undang-Undang Pemerintahan Lama yang mengatur urusan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral hanya menjadi kewenangan Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Provinsi menyebabkan Pemerintahan Kabupaten/Kota mengalami berbagai hambatan di bidang pertambangan termasuk untuk pengawasan dinas/badan/bagian terhadap pertambangan di Kabupaten Malang .

Berdasarkan penjelasan diatas, hambatan implementasi Perda Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2012 terkait pengawasan dari dinas terkait dapat terjadi dikarenakan faktor norma (legal substance) dengan banyaknya peraturan-peraturan pelaksana Perda Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2012 yang belum dibentuk, faktor aparatur (legal structure) yang kurang diatur secara jelas dalam pasal 104-106 tentang pengawasan, dinas/badan/bagian mana saja yang seharusnya melakukan pengawasan terhadap pertambangan di Kabupaten Malang serta faktor budaya (legal culture) masyarakat yang kurang mengetahui bahwa pengawasan pertambangan telah diatur dalam Perda Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2012 tersebut.

Faktor internal hambatan implementasi terkait pengawasan oleh Dinas ESDM Kabupaten Malang terdapat beberapa faktor yaitu² :

1. Jumlah pegawai dengan latar belakang teknis tambang dan geologi sedikit
2. Kabupaten Malang tidak memiliki inspektur tambang

Faktor-faktor diatas merupakan faktor internal yang yang dihadapi oleh Dinas ESDM Kabupaten Malang, sedangkan yang menjadi faktor eksternal hambatan implementasi terkait pengawasan yaitu³ :

1. Peraturan turunan dari Perda Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mine-ral dan Batu Bara belum ada
2. Kurangnya koordinasi antar dinas/badan/ bagian untuk melakukan pengawasan di bidang pertambangan
3. Banyak masyarakat yang tidak tahu adanya Perda Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara

Upaya dalam mengatasi hambatan implementasi Perda Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara terkait pengawasan oleh dinas terkait untuk faktor internal Dinas ESDM Kabupaten Malang yaitu dengan rutin untuk melakukan dan ikut dalam seminar-seminar untuk memperbanyak ilmu bagi pegawai yang kurang memiliki latar belakang teknis tambang dan geologi. Penempatan pegawai yang kurang sesuai yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, dengan keahlian yang dimiliki menyebabkan Dinas ESDM kesulitan untuk menyesuaikan apa yang ada di lapangan. Adapun pegawai yang sudah mengikuti pelatihan atau seminar-seminar untuk teknis tambang dan geologi tetap harus mengikuti roling Pegawai Negeri Sipil yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Malang. Hal tersebut juga menjadi kendala tersendiri bagi Dinas ESDM Kabupaten Malang.

Untuk inspektur tambang, sebagai-mana yang diatur dalam Ketentuan peralihan Perda Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2012 dalam pasal 121 mengatur apabila pemerintah daerah tidak memiliki inspektur tambang maka Tim Pemerintah Daerah yang melaksanakannya, yang berbunyi: dalam hal Pemerintah Daerah belum memiliki Inspektur Tambang, maka tugas dan wewenang Inspektur Tambang dilaksanakan oleh Tim Pemerintah Daerah yang bertugas di bidang pengawasan pertambangan. Tim Pemerintah Daerah yang

² Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pertambangan dan Sumber Daya Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Malang, tanggal 17 Oktober 2014

³ Ibid

bertugas di bidang pengawasan pertambangan, jumlah pegawainya sangat kurang untuk melakukan pengawasan secara terus-menerus di semua Wilayah Pertambangan di Kabupaten Malang.

Dengan jumlah kecamatan di Kabupaten Malang sejumlah 33 Kecamatan, hal ini menjadi semakin sulit untuk dilaksanakan. Perlunya koordinasi Dinas ESDM Kabupaten Malang dengan Pemerintah Kabupaten Malang untuk menambah pegawai yang mempunyai keahlian di bidang teknis tambang dan geologi dan menambah untuk penambahan pegawai untuk menjadi inspektur tambang di tiap-tiap kecamatan.

Upaya Dinas ESDM dalam mengatasi faktor eksternal hambatan implementasi Perda Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara terkait pengawasan dinas terkait adalah dengan melakukan koordinasi dengan dinas-dinas terkait seperti Badan Pelayanan Perizinan Terpadu untuk memberikan rekomendasi pada BP2T Kabupaten Malang untuk menerbitkan ijin pertambangan sebelum keluarnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, koordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang yaitu dalam hal penetapan tata wilayah serta tata ruang untuk lokasi pertambangan yang boleh atau layak untuk dilakukan penambangan.

Untuk koordinasi dengan Badan Lingkungan Hidup, rekomendasi yang diberikan oleh BLH Kabupaten Malang terkait AMDAL, UKL-UPL wajib diberikan pada Dinas ESDM untuk selanjutnya diberikan pada BP2T Kabupaten Malang, koordinasi dengan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Malang tidak banyak dilakukan karena masing-masing tugas yang dilakukan Dinas ESDM dan DPPKA sama-sama melakukan pengawasan di bidang pertambangan tetapi dalam hal yang berbeda. Dinas ESDM Kabupaten Malang melakukan pengawasan pada teknis pertambangannya sedangkan DPPKA Kabupaten Malang melakukan pengawasan pada pendapatan yang diperoleh dari hasil tambang. Dengan Bagian Hukum Kabupaten Malang, Dinas ESDM melakukan pengusulan-pengusulan untuk dibuatnya Peraturan Daerah terkait pertambangan yang nantinya produk hukum tersebut dikeluarkan oleh Bagian Hukum Kabupaten Malang serta melakukan koordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Malang dalam hal penindakan pada penambang yang tidak memiliki ijin menambang apabila kasus penambang tersebut dilaporkan oleh dinas terkait.

Koordinasi yang dilakukan oleh dinas-dinas terkait tersebut harus sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa tiga komponen utama yang harus dimiliki dalam di Indonesia, yaitu⁴:

1. Komponen struktur (legal structure) yaitu kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan untuk melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur.
2. Komponen substantif (legal substance) yaitu sebagai output dari sistem hukum berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur.
3. Komponen kultural (legal culture) yaitu terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum, atau disebut sebagai kultur hukum. Kultur hukum inilah yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat.

Koordinasi yang kurang antar dinas/badan/bagian tersebut dapat dikatakan sebagai kurangnya legal structure yang baik dalam pengawasan pertambangan di Kabupaten Malang.

Untuk Peraturan turunan dari Perda Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang masih belum dibuat, Dinas ESDM Kabupaten Malang tidak bisa melakukan banyak tindakan sebab untuk mengeluarkan dan mengesahkan suatu peraturan daerah maupun peraturan bupati merupakan wewenang dari Bupati Malang dan Dinas ESDM Kabupaten Malang kurang berhak untuk melakukan hal tersebut. Sedangkan untuk masyarakat yang kurang mengetahui adanya Perda Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara adalah dengan melakukan penyuluhan-penyuluhan ke daerah-daerah secara merata tetapi pengimplementasian hal tersebut sulit untuk dilakukan karena adanya keterbatasan waktu dan keterbatasan pegawai untuk melakukan penyuluhan-penyuluhan terkait Perda Nomor 2 Tahun 2012.

⁴ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 6

D. PENUTUP

Kesimpulan

Hambatan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara terkait dengan pengawasan oleh dinas terkait dibagi atas faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal hambatan implementasi terkait pengawasan terdapat beberapa faktor yaitu :

1. Jumlah pegawai dengan latar belakang teknis tambang dan geologi sedikit
2. Kabupaten Malang tidak memiliki inspektur tambang

Faktor eksternal hambatan implementasi terkait pengawasan oleh Dinas ESDM Kabupaten Malang yaitu :

1. Peraturan turunan dari Perda Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara belum ada
2. Kurangnya koordinasi antar dinas/ badan/bagian untuk melakukan pengawasan di bidang pertambangan
3. Masyarakat yang tidak tahu adanya Perda Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara

Upaya dalam mengatasi hambatan implementasi Perda Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara terkait pengawasan oleh dinas terkait yaitu:

1. rutin untuk melakukan dan ikut dalam seminar-seminar untuk memperbanyak ilmu bagi pegawai yang kurang memiliki latar belakang teknis tambang dan geologi
2. perlunya koordinasi Dinas ESDM Kabupaten Malang dengan Pemerintah Kabupaten Malang untuk menambah pegawai yang menjadi inspektur tambang di tiap-tiap kecamatan.
3. melakukan koordinasi dengan dinas-dinas terkait seperti Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang, Badan Lingkungan Hidup, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Malang, Bagian Hukum Kabupaten Malang, Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Malang untuk melakukan pengawasan pertambangan di Kabupaten Malang.

Saran

Saran yang diberikan peneliti setelah mengerjakan skripsi “Hambatan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Studi di Kabupaten Malang) adalah :

1. Dengan disahkannya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah diharapkan Perda 2 Tahun 2012 direvisi sebab dari awal pembentukan perda tersebut telah menimbulkan banyak kontroversi seperti adanya ketentuan batu bara yang diatur didalamnya, sementara di wilayah Kabupaten Malang tidak ditemukan potensi batu bara
2. Secepatnya dibuat Keputusan Bupati Kabupaten Malang tentang tindaklanjut dari Perda Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2012 apabila untuk membuat Peraturan Bupati dirasa cukup memberatkan dikarenakan sekarang ini Wilayah Pertambangan di Pulau Jawa dan Bali telah dikeluarkan melalui Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 1204 K/30/MEM/2014 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Jawa dan Bali
3. Pengawasan yang dilakukan dinas-dinas terkait harus lebih sering melakukan koordinasi satu sama lain demi terciptanya pertambangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Perusahaan tambang yang bersangkutan diharapkan dapat menerina penelitian dalam bidang hukum, bukan hanya penelitian dalam bidang teknik saja.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Arikunto , 2002, **Prosedur Penelitian : Suatu pendekatan Praktek**, PT.Asdimahasatya, Jakarta.
- Data Bagian Hukum Kabupaten Malang, Prolegda Tahun 2011
- Data Mineral Di Kabupaten Malang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang**, 2010, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang.
- Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Malang, 2012, **Potensi Pertambangan di Kabupaten Malang (*The Golden Rock*)**
- Gatot Supramono, 2012, **Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia**, Rineka Cipta, Jakarta.
- Kabupaten Malang Dalam Angka tahun 2013**, cetakan tahun 2013, Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang.
- Muhamad Erwin, 2009, **Hukum Lingkungan (dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup)**, Refika Aditama, Bandung.
- Salim HS, 2004, **Hukum Pertambangan di Indonesia**, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Soejono Soekanto, 1982, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Press, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2007, **Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar)**, Liberty, Yogyakarta.
- Syamsuharya Bethan, 2008, **Penerapan Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup dalam Aktivitas Industri Nasional**, PT.Alumni, Bandung.

PERATURAN PER-UU-AN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo Undang-undang No. 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);

Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3876);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang tanggal 25 Januari 2008 Nomor 1/D)

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 2/D);

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2012 Nomor 1/E);

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 1204 K/30/MEM/2014 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Jawa dan Bali

Peraturan Bupati Malang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 20/D);

Peraturan Bupati Malang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Badan Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 26/D);

Peraturan Bupati Malang Nomor 44 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2012 Nomor 11/D);

Peraturan Bupati Malang Nomor 52 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2012 Nomor 16/D);

Peraturan Bupati Malang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Yang Menjadi Wewenang Bupati di Bidang Pelayanan Administrasi Perizinan Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2014 Nomor 3 Seri C)

INTERNET

Badan Geologi Kementerian ESDM, Neraca Sumber Daya Mineral (Laporan Pemuktahiran Data dan Neraca Sumber Daya Mineral, T.A 2013), (online), http://psdg.bgl.esdm.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=1062&Itemid=681 diakses tanggal 25 November 2014

Putra Bupati Malang dalam Proyek Rebutan Pasir Besi, (online), http://m.berita-jatim.com/peristiwa/190336/ada_putra_bupati_malang_dalam_proyek_rebutan_pasir_besi.html diakses tanggal 18 Maret 2014

Tugas Pokok Fungsi Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malang, <http://kab-malang.bpn.go.id/Tentang-Kami/Tugas-dan-Fungsi>, diakses 23 Januari 2015

Visi dan Misi Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malang, <http://kab-malang.bpn.go.id/Tentang-Kami/Visi-Misi-dan-Strategi>, diakses tanggal 23 Januari 2015